

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

penerimaan Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara diluar minyak dan gas (migas) yang semakin kesini semakin menurun dan cadanganya semakin menipis. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan serta memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemerintah senantiasa memulai sebuah kebijaksanaan yaitu dengan mengaplikasikan sistem pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan

persewaan tanah dan/ atau bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PT. Sederhana Karya Jaya atas Jasa Konstruksi merupakan salah satu perusahaan yang terkena dampak kebijaksanaan PPh-Final. Sebagai perusahaan perintis penyelenggaraan jalan tol yang merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri di tanah air, yang tidak hanya berperan sebagai operator tetapi juga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Manado dengan berorientasi pada kaidah-kaidah korporasi. Sebagai perseroan yang konsisten untuk menjadi market leader dalam industri jalan tol PT. Sederhana Karya Jaya. Memfokuskan mengembangkan usaha dengan penambahan panjang jalan tol yang ada melalui pembangunan jalan-jalan tol baru yang terkoneksi dengan jalan tol yang beroperasi.

Pembangunan jalan tol baru yang memiliki tingkat kelayakan yang baik dan terkoneksi memberikan sinergi pertumbuhan yang lebih baik pada jalan tol yang lama dan memberikan jaminan adanya volume lalu lintas yang mendukung kelayakan proyek pada jalan tol baru tersebut.

Di samping pengembangan usaha yaitu dengan penambahan jalan tol, Perseroan juga mengembangkan usaha lainnya di luar usaha jalan tol dengan mengkapitalisasi aset-aset yang dimiliki seperti penyewaan lahan, pengembangan rest area, pemasangan space iklan, serta jasa pengoperasian jalan tol pihak lain. Untuk usaha lain di luar usaha jalan tol, Perusahaan SKJ juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset-

aset yang ada untuk meningkatkan kontribusi pendapatan. Hal ini dilakukan dengan mengkapitalisasi lahan yang ada seperti Peningkatan Jalan Raya.

PT. SKJ dari usahanya adalah penghasilan dari Jasa Konstruksi PPh-Final yang ketetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002.

Pelaksanaan peraturannya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 27/PJ./2002. Berlaku mulai tanggal 28 Maret 2002. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Implementasi Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, salah satunya ialah prosedur pemotongan yang dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan prosedur pemotongan sendiri oleh yang menyewakan dalam hal ini penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor pelayanan pajak.

Pencatatan dalam Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam perusahaan karena dari analisis digunakan oleh pihak intern, maupun ekstern perusahaan untuk mengetahui jumlah peredaran atau penghasilan bruto serta penghasilan yang dikenakan PPh final sehingga dapat menggambarkan jumlah peredaran/ penerimaan bruto dari penghasil atas persewaan tanah dan/ atau bangunan kepada perusahaan lain. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mencoba menguraikannya dalam Tugas Akhir dengan judul “Akuntansi dan Pemungutan UU PPH 4 ayat 2 Final atas Jasa Kontruksi pada Perusahaan PT, Sederhana Karya Jaya”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , Maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemungutan PPH PASAL 4 ayat 2 atas jasa Kontruksi pada perusahaan PT, SEDERHANA KARYA JAYA.
2. Bagaimana Pencatatan Akuntansi PASAL PPH 4 ayat 2 pada perusahaan PT, SEDERHANA KARYA JAYA.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemungutan PPH PASAL 4 ayat 2 atas jasa Kontruksi pada perusahaan PT, SEDERHANA KARYA JAYA.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pencatatan Akuntansi PPH PASAL 4 ayat 2 pada perusahaan PT, SEDERHANA KARYA JAYA.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi instansi atau Wajib Pajak Memberikan informasi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final dan solusi untuk masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan.
2. Bagi Penulis Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
3. Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

1.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan informasi atau data actual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa konsistensi dan praktek yang berlaku, melihat evaluasi apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman tersebut untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

1.6 Deskripsi Umum PT. Sederhana Karya Jaya

a. Sejarah Perusahaan

CV. Biro Teknik Sederhana, Berkedudukan di Manado Merupakan perusahaan yang bergerak dalam Bidang Jasa Kontruksi yang aktif dalam industri Pembangunan Indonesia dan memberikan konstruksi yang bermanfaat, sejak tanggal 14 Juni 1975, yang didirikan oleh :

1. Fanny. Nasry B. BUS, M. COM
2. K. J Nasry

Setelah melewati beberapa Tahun, pada tanggal 30 Desember 1978 CV. Biro Teknik Sederhana, tersebut telah setuju dan mufakat untuk merubah bentuk Perseroan tersebut menjadi Perseroan Terbatas, yaitu dengan mengikut sertakan teman persero baru kedalam perseroan terbatas tersebut, yaitu Ingrid Juliana Fulamri menggantikan Kweery Jauh Rias dari perseroan, dan CV. Biro Teknik Sederhana merubah nama menjadi PT. Sederhana Karya Jaya.

Perusahaan ini didirikan untuk waktu Tujuh Puluh Lima tahun berturut-turut dan mulai tanggal 30 Desember 1978 mendapat persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasarnya dan setelah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manado dan diumumkan anggaran dasarnya dalam Berita Negara sesuai pasa 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Surat Ijin Sementara Tertanggal 30 Oktober 1978 nomor 321/24/DN/X/78 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

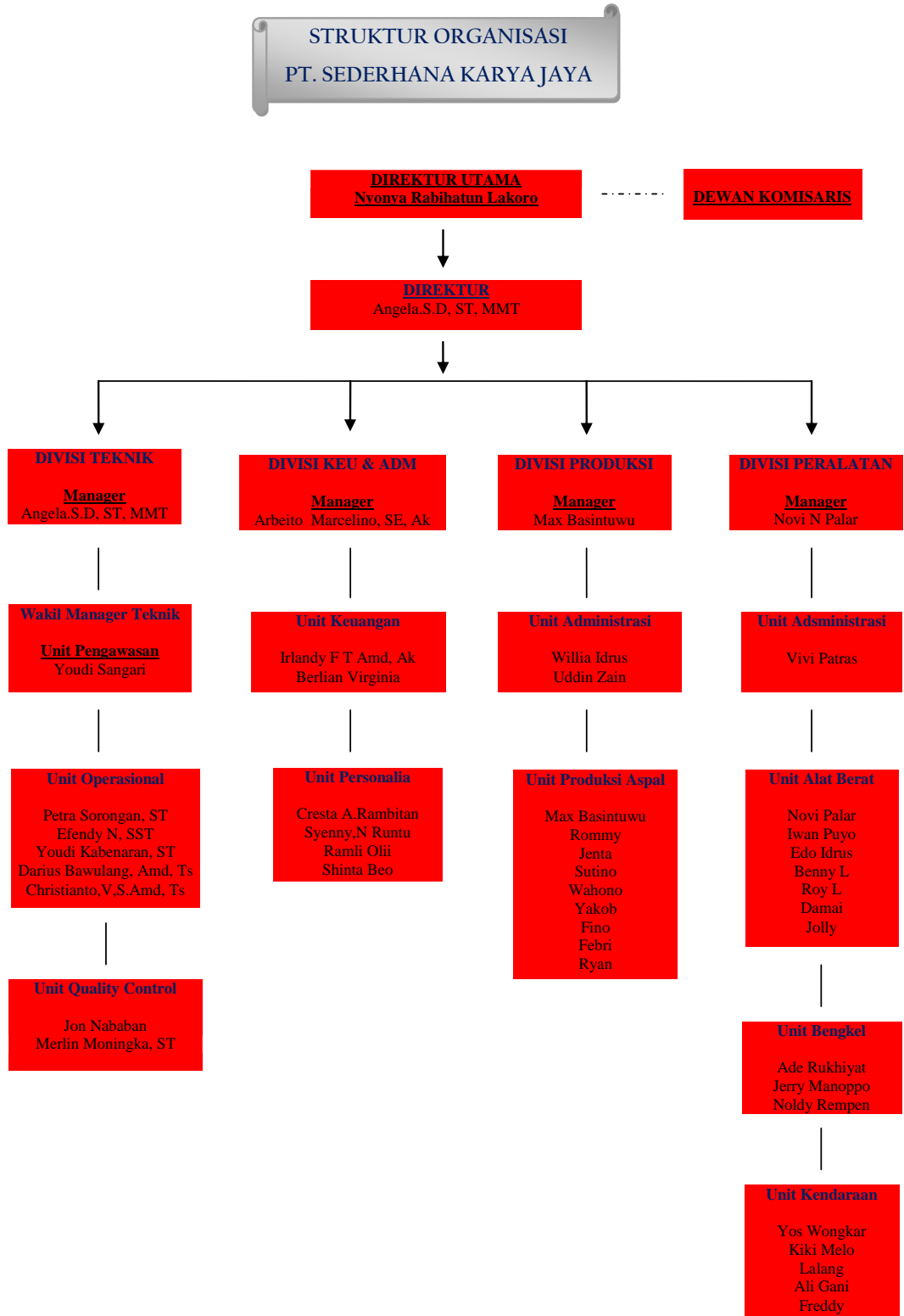
Surat Pemberian Ijin Tempat Usaha, tertanggal 30 Oktober 1978 nomor uhuk 423/WKDM/78 yang diberiakn oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Manado.

Maka sejak dimulainya Perusahaan Terbatas ini dengan memasukkan perseroan Komanditer C.V Biro Teknik Sederhana kedalamnya maka dengan sendirinya berakhir dan hapuslah perseroan Komanditer C.V Biro Teknik Sederhana tersebut sejak mulai didirikan Perusahaan Terbatas Yang Bernama PT.SEDERHANA KARYA JAYA.

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 24 Februari 2016 dengan akte notaris, dihadapan Notaris Julius Daniel Ismawi SH, adapun saat ini PT. Sederhana Karya Jaya Dipimpin Oleh :

1. K. J Nasry Sebagai Komisaris Utama
2. Fanny Nasry, B. BUS, M. COM Sebagai Komisaris
3. Nyonya Rabihatun Lakoro Sebagai Direktur Utama
4. Angela Susilawati Djarkasi, ST. MMT Sebagai Direktur

b. STRUKTUR ORGANISASI



- b. Dewan Komisaris : - Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan Mengadakan rapat dan pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional Perseroan.
- Direktur Utama : - Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan, mengkoordinirsertamembimbing kegiatan perusahaan sehari-hari.
- Mempertanggung jawabkan semua kewajiban yang menyangkut rugi laba perusahaan, produksi, keuangan dan pemasaran
- Menejer Teknik : - Mengatur para insinyur yang seringkali bergerak tanpa pemikian *entrepreneurship*
- Menejer Keuangan : - Menyusun, menyiapkan dan menafsirkan laporan , anggaran dan laporan keuangan
- Mengawasi staf
- Mengelola anggaran
- Memproduksi rencana bisnis jangka panjang

Menejer Produksi : - Menciptakan Nilai tambah organisasi dan membantu mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan dengan pemuasan keinginan konsumen atas produk organisasi tersebut, dan bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu organisasi.

c. Aktifitas Usaha Perusahaan

Adapun maksud dan tujuan PT. Sederhana Karya Jaya ialah meneruskan dan melanjutkan semua usaha dari CV. Biro Teknik Sederhana, yaitu :

Mendirikan dan menjalankan perusahaan- perusahaan di antaranya

1. Biro bangunan, yaitu sebagai pemborong / perencana / pelaksana bangunan jalan, jembatan dan pengairan.
2. Biro teknik, yaitu sebagai pemborong / perencana / pelaksana instalasi listrik, telepon, gas dan air ledeng.
3. Perindustrian
4. Perbengkelan
5. Pengangkutan